

IMPLEMENTATION OF LAKIP AS A PERFORMANCE EVALUATION TOOL AT THE REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH ACEH REGENCY

¹Diva Nabilah, ²Putri Nadia, ³Durratun Nafisah, ⁴Riska Maulina, ⁵Intan Cahyani Rachman, ⁶Halimatus Sa'diyah, ⁷M. Yazid AR

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, email. divanabila137@gmail.com

Received Date. 02 Juli 2023

Revised Date. 25 Juli 2023

Accepted Date. 27 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) at the Regional Secretariat of North Aceh Regency, focusing on its effectiveness in achieving performance targets, identifying challenges, and assessing its relevance to strengthening accountability, transparency, and the quality of local governance. The study employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews with government officials and document analysis, including strategic plans, performance reports, and relevant regulations. The collected data were analyzed thematically to identify patterns, supporting factors, and obstacles in the implementation of LAKIP. The findings indicate that the implementation of LAKIP in North Aceh Regency has been relatively effective in promoting accountability and achieving strategic performance indicators, particularly in governance and human resource development. However, challenges remain, including budget limitations, inter-agency coordination issues, and gaps in human resource capacity. To enhance LAKIP's effectiveness, it is necessary to strengthen officials' competencies, optimize budget management, and increase public participation in the performance evaluation process of local government.

Keywords:

LAKIP, performance evaluation, accountability

Kata Kunci:

LAKIP, evaluasi kinerja, akuntabilitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, dengan fokus pada efektivitas pencapaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta relevansinya terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aparatur pemerintah serta analisis dokumen, seperti rencana strategis, laporan kinerja, dan regulasi terkait. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, faktor pendukung, serta hambatan dalam implementasi LAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi LAKIP di Kabupaten Aceh Utara relatif efektif dalam mendorong akuntabilitas dan pencapaian indikator kinerja strategis, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta kapasitas SDM pada sektor tertentu. Untuk meningkatkan efektivitas LAKIP, diperlukan penguatan kompetensi aparatur, optimalisasi pengelolaan anggaran, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Kinerja pada dasarnya merujuk pada hasil yang dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kinerja mencerminkan kemampuan untuk mencapai tujuan melalui efisiensi, efektivitas, dan kualitas kerja yang optimal. Peningkatan kinerja instansi pemerintah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan pemerintah perlu dirancang serta dilaksanakan dengan pendekatan yang terukur agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Evaluasi kinerja memiliki peran penting untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan berkelanjutan. Umam dan Rusli (2021) menegaskan bahwa evaluasi kinerja bertujuan mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis instansi yang menekankan perlunya indikator yang sistematis dan terukur dalam proses tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam menilai kinerja pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Yusuf (2020) menjelaskan bahwa LAKIP merupakan dokumen akuntabilitas yang berisi informasi pencapaian kinerja suatu instansi terhadap rencana strategis yang telah ditetapkan. Melalui LAKIP, pencapaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara transparan kepada publik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara merujuk pada berbagai regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Secara fungsional, LAKIP berperan mendorong instansi pemerintah agar melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien. LAKIP juga menjadi instrumen penting yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja, sehingga aktivitas instansi dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip good governance. Dengan demikian, pengelolaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penerapan LAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara memerlukan perencanaan strategis yang jelas, terutama dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan kinerja. Perencanaan yang baik akan membantu instansi

mencapai tujuan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana rencana strategis yang disusun berpengaruh terhadap capaian kinerja instansi.

LANDASAN TEORETIS

Teori Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Menurut Yusuf (2020), menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja berfungsi untuk mengkomunikasikan pencapaian instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Fitrinisa dalam Elvira (2021) menjelaskan bahwa LAKIP disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bagi pengambil keputusan, LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan keberhasilan maupun kegagalan secara menyeluruh.

Selanjutnya, Sarimalia dan Fitriastuti (2021) menyatakan bahwa LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang terkait dengan tujuan dan sasaran organisasi. Instansi yang bersangkutan harus bertanggung jawab serta menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa LAKIP merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah yang disusun secara tertulis, periodik, dan sistematis untuk mengkomunikasikan capaian kinerja tahunan. LAKIP berfungsi sebagai wujud akuntabilitas dengan menyajikan data relevan guna mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan, serta menjadi media pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Teori Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana individu, tim, atau organisasi telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan, dan menentukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan manajemen untuk menilai kinerja karyawan dengan membandingkan pelaksanaan tugas dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Simamora (2004) menggambarkan evaluasi

kinerja adalah prosedur yang digunakan perusahaan untuk menilai seberapa baik setiap karyawan melakukan tugasnya.

Evaluasi kinerja sebagai metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang, sekelompok orang, atau unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bernardin dan Russel (1993) menjelaskan metode untuk mengukur seberapa banyak kontribusi karyawan kepada perusahaan tempat mereka bekerja dikenal sebagai evaluasi kinerja.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan proses formal dan terstruktur yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas individu maupun unit kerja dengan membandingkannya terhadap standar atau tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kinerja mempertimbangkan elemen pekerjaan, perilaku, dan hasil yang dicapai sebagai dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual melalui penggalian makna, pengalaman, serta pola yang muncul dari data lapangan (Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2022).

Data penelitian diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan aparatur Sekretariat Daerah yang terlibat langsung dalam penyusunan dan evaluasi LAKIP, serta analisis dokumen yang mencakup dokumen perencanaan strategis, laporan kinerja, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses akuntabilitas kinerja.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, yaitu proses identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan informasi dari berbagai informan dan memadukan hasil wawancara dengan data dokumenter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi LAKIP pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi LAKIP tahun 2022 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasil

menunjukkan bahwa instansi telah memiliki perencanaan strategis yang cukup baik melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2022–2025. Penyusunan LAKIP mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 7 tujuan strategis, 26 sasaran strategis, dan 30 indikator kinerja utama (IKU). Evaluasi kinerja dilakukan melalui penilaian mandiri serta perbandingan terhadap target tahunan.

Capaian Kinerja Tahun 2022

Penilaian capaian kinerja mengacu pada standar predikat dari Kementerian PAN-RB, yaitu *Sangat Berhasil*, *Berhasil*, *Cukup Berhasil*, dan *Tidak Berhasil*. Berikut ringkasan capaian kinerja LAKIP Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2022:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien
 - a. Capaian: 106,35% (*Sangat Berhasil*).
 - b. Didukung capaian WTP (100%), nilai AKIP (102,25%), serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,44% (*Berhasil*). Upaya peningkatan dilakukan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan (SPBE, e-SAKIP), serta penguatan budaya kerja ASN.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan syariat dan budaya
 - a. Capaian: 100,07% (*Sangat Berhasil*).
 - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terealisasi 73,35 (99,93%). Didukung capaian pendidikan (97,96% dan 99,80%), kesehatan (105,06% dan 90%), serta pemberdayaan perempuan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,3 (99,79%).
3. Menurunkan tingkat kemiskinan
 - a. Capaian: 100,69% (*Sangat Berhasil*).
 - b. Didukung oleh turunnya tingkat kemiskinan menjadi 16,11% dari target 16%, penurunan pengangguran (105,85%), peningkatan pendapatan per kapita Rp47,60 juta (162,90%), dan kemandirian gampong (101,56%). Program yang mendukung termasuk bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan penguatan BUMG.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - a. Capaian: 98,34% (*Sangat Berhasil*).
 - b. Pertumbuhan ekonomi 3,56% dari target 3,62%. Sektor pertanian (94,94%), industri pengolahan (76,47%), perdagangan (66,54%), inflasi terkendali (93%), dan investasi terealisasi Rp370,41 miliar (116,99%). Sektor perdagangan masih perlu diperkuat.
5. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik
 - a. Capaian: 83,60% (*Berhasil*).

- b. Infrastruktur dasar dalam kondisi baik tercapai 65,16% dari target 77,94%. Peningkatan dilakukan melalui rehabilitasi sekolah, puskesmas, pasar, serta bantuan rumah layak huni (88,53%, *Sangat Berhasil*).
- 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - a. Capaian: 93,51% (*Sangat Berhasil*).
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,01 dari target 70,59. Kualitas udara melebihi target (104,68%), kualitas air (81,42%), dan tutupan lahan (81%). Upaya mencakup gerakan penghijauan, pengendalian sampah, serta pengawasan industri.
- 7. Meningkatkan tata kelola kebencanaan
 - a. Capaian: 98,44% (*Sangat Berhasil*).
 - b. Indeks Risiko Bencana mencapai 166,20 dari target 163. Namun, kapasitas masyarakat menghadapi bencana masih rendah (22,67%, *Tidak Berhasil*), akibat minimnya sosialisasi, pelatihan, dan keterbatasan sarana.

Implementasi LAKIP di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan kinerja yang secara umum tergolong Sangat Berhasil. Namun, terdapat beberapa area yang masih membutuhkan perhatian, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor perdagangan, serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi LAKIP di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara secara umum mencapai predikat *Sangat Berhasil*, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan, kualitas SDM, penurunan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian ini memperlihatkan bahwa instrumen LAKIP berfungsi efektif sebagai alat akuntabilitas dan pengendali kinerja. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, digitalisasi birokrasi, serta program pembangunan yang berbasis outcome. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramasoyan et al. (2021) yang menyatakan bahwa faktor SDM, pemanfaatan teknologi akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam mendorong efektivitas pelaksanaan anggaran daerah.

Namun, capaian yang tinggi ini tidak menutup fakta bahwa masih terdapat kelemahan pada beberapa indikator. Rendahnya capaian infrastruktur pelayanan publik (83,60%) dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana (22,67%) menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah dan minimnya alokasi anggaran

menjadi kendala utama, sebagaimana ditegaskan oleh Karunia (2023) bahwa implementasi e-Government dan kualitas layanan publik di daerah sering terhambat oleh keterbatasan fiskal dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, Aceh Utara menghadapi tantangan struktural yang sama dengan banyak daerah lain di Indonesia, di mana capaian kinerja belum sepenuhnya merata pada semua sektor.

Tingginya capaian indikator tata kelola pemerintahan (106,35%) menunjukkan efektivitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan Pamungkas et al. (2020) serta Jeriansyah & Mappanyukki (2020), yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Capaian WTP dan nilai AKIP yang tinggi di Aceh Utara juga mengonfirmasi pentingnya akurasi administrasi aset dan pelaporan keuangan sebagaimana ditekankan oleh Pattawe et al. (2022). Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas program serta memperkuat legitimasi di mata publik.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya gap antara praktik implementasi dengan kerangka ideal akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan Agung (2020), rendahnya akuntabilitas kinerja masih menjadi masalah di banyak daerah, terutama disebabkan oleh lemahnya kualitas laporan kinerja dan keterbatasan SDM dalam pengelolaan anggaran. Tantangan serupa ditemukan di Aceh Utara pada aspek kapasitas masyarakat menghadapi bencana serta infrastruktur publik, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pada dimensi tata kelola belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar. Hal ini memperkuat pandangan Muhtar (2022) bahwa peningkatan akuntabilitas dan pengawasan publik lebih berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daripada faktor politik seperti masa jabatan kepala daerah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan dalam capaian kinerja juga erat kaitannya dengan keterbatasan fiskal dan potensi ekonomi daerah. Lestari & Utama (2019) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan sumber daya ekonomi antarwilayah sering menimbulkan disparitas dalam kesejahteraan dan layanan publik. Aceh Utara, meskipun memiliki capaian positif pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, masih menghadapi hambatan dalam optimalisasi sektor perdagangan dan industri pengolahan yang kontribusinya belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan LAKIP perlu ditopang oleh strategi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi LAKIP di Aceh Utara telah berperan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Namun, untuk mencapai standar ideal akuntabilitas publik seperti yang digariskan oleh Afiah & Azwari (2015) dan Nirwana & Haliah (2018), diperlukan intervensi lebih lanjut dalam penguatan

SDM, pemerataan alokasi belanja modal, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Penguatan regulasi pengelolaan keuangan serta penerapan teknologi informasi juga krusial untuk mengurangi gap antara praktik aktual dan harapan normatif. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan dan optimalisasi desentralisasi fiskal dapat tercapai, sekaligus menjawab tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara telah berjalan dengan cukup efektif, terbukti dari sebagian besar capaian indikator strategis yang masuk kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan terutama tampak pada aspek tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan hidup, yang didukung oleh penguatan akuntabilitas keuangan, digitalisasi layanan, dan penerapan prinsip transparansi.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan pada sektor tertentu, seperti infrastruktur pelayanan publik dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, yang masih jauh dari target. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan realisasi, dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kualitas SDM di bidang tertentu.

Dengan demikian, LAKIP terbukti berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, untuk mencapai standar ideal akuntabilitas publik, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pemerataan alokasi belanja modal, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan partisipasi publik. Upaya ini penting agar implementasi LAKIP tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.

REFERENSI

- Afiah NN, Azwari PC. The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2015;211:811. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Agung MT. The Effect of Financial Reporting Quality on Regional Governments' Performance Accountability. *KnE Social Sciences*. 2020. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6636>

- Bernardin, H.J., & Russel, J.E.A. (1993). *Humans Resource Management: an Experimental Approach*, International Edition. Singapore: McGraw Hill. Inc
- Elvira RR. Analisa Implementasi SAKIP dan LAKIP Tahun 2019 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah [disertasi]. Tanjungpinang: STIE Pembangunan; 2021. <http://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/1244>
- Farida N, Suman A, Sakti RK. Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*. 2021;9(2):1. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.009.02.1>
- Hadi ARA, Diantimala Y, Fahlevi H. The Effect of Preventive Supervision, Detective Supervision on the Effectiveness of Financial Budget Control and Its Impact on Good Governance of Aceh Government (Study on Aceh Government Unit). *Int J Acad Res Bus Soc Sci*. 2018;8(5). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i5/4171>
- Henry, S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN
- Jeriansyah W, Mappanyukki R. The Effect of Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Int J Asian Soc Sci*. 2020;10(12):721–9. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.1012.721.729>
- Karunia RL. Implementation of e-Government for Better Public Service at Lombok Barat. *KnE Social Sciences*. 2023:379. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13560>
- Lestari S, Utama MS. The Effect of Local Government Own Revenue and Revenue Sharing Funds on Economic Performance and Community Welfare through Capital Expenditure of Regency/City in Bali Province, Indonesia. *Russ J Agric Socio-Econ Sci*. 2019;91(7):67. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.08>
- Mariana M, Murthaza M. Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. 2019;13(1):62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Muhtar M. The impact of financial accountability, public monitoring and local head tenure on local government performance: Empirical investigation in Indonesia. *Sebelas Maret Business Review*. 2022;7(1):1. <https://doi.org/10.20961/smbr.v7i1.62382>
- Mukmin MN, Kusuma IC, Susandra F, Dharmawan N. Government Investment: Review of Regional Revenue and Central Government Allocation Funds for Regional Development. *Int J Entrep Bus Dev*. 2020;3(4):479. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v3i4.1206>

- Nufiar, Rahmad, Safriadi, Mariana. Determination of the Cost Maintenance of Pawned Goods in Islamic Law Perspective. *Baltic J Law Politics*. 2022;15(3):1561–70. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Nirwana N, Haliah H. Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors. *Asian J Account Res*. 2018;3(1):28. <https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0014>
- Pamungkas LD, Kismartini K, Astuti RS. The Analysis of Organizational Capacity Factors in Government Division of Regional Secretariat as A Determinant of Government Performance at Batang Regency. *IAPA Proc Conf*. 2020:80. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.399>
- Pattawe A, Abdullah MI, Karim F, Kahar A, Din M, Zahra F, et al. Improving Regional Financial Management through Administration of Regional Property and Financial Reporting on Regional Assets. *Research Horizon*. 2022;2(1):283–94. <https://doi.org/10.54518/rh.2.1.2022.283-294>
- Ramasoyan AL, Lamba A, Patma K, Larasati R. Analysis of the Factors that Influence Performance in the Implementation of Regional Budgets as an Effort to Achieve a Proper Government in Papua. *Dev Manage Entrepren Methods Transport (ONMU)*. 2021;1:29. <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2021-1-29-43>
- Sarimalia R, Fitriasuri. Penerapan Good Governance dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *JIBM*. 2021;4(1):43–58. <https://id.scribd.com/document/504471492>
- Umam U, Rusli Z. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Publika: J Ilmu Adm Publik*. 2021;7(2):202–13. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7747](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7747)
- Witono B, Nurkholis N, Roekhudin R. Regulation Hegemony and Accountability of the Local Government: A Study on Regional Financial Management in Indonesia. *Int J Account Bus Soc*. 2021;29(1):57. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2021.29.1.4>